

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Peran Negara dalam kebijakan pembangunan rumah susun BidaraCina yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Perumahan Pemerintah DKI Jakarta, terlihat sangat dominan dari proses perencanaan kebijakan hingga pengimplementasiannya. Hal ini terlihat dari tidak adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan rumah susun hingga proses relokasi. Hal ini disebabkan karena kurangnya kepedulian masyarakat dan juga karena kurangnya pengetahuan masyarakat. Elit pemerintah merupakan pusat dari kebijakan ini dan Negara mempunyai kepentingan tersendiri dalam implementasi kebijakan tersebut.

Dengan dominannya peran Negara, maka dalam proses pengimplementasiannya, pemerintah perlu melakukan hal-hal untuk mensosialisasikan kebijakan tersebut. Dalam hal ini pemerintah melakukan pendekatan-pendekatan agar masyarakat mau direlokasi ke rumah susun yang telah dibangun. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan bersifat represif. Hal ini dapat dilihat dari tidak diberikannya pilihan kepada masyarakat. Jadi masyarakat hanya bisa menerima kebijakan tersebut. Hal ini diperkuat dengan kondisi lahan yang ditempati masyarakat pada waktu itu adalah tanah milik pemerintah. Hal ini semakin menguatkan dominasi pemerintah. Model implementasi kebijakan pembangunan rumah susun yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta ini adalah pendekatan *State Interest-Elitis*. Yaitu Negara merupakan pihak yang mempunyai peran besar dalam implementasi sebuah kebijakan.

Saran

Dalam Negara berkembang seperti Indonesia ini, peran Negara yang besar memang sangat dibutuhkan. Banyak hal yang membutuhkan peran dominan Negara. Ha ini juga diikuti oleh faktor-faktor lain seperti tingkat pendidikan masyarakat yang masih di bawah rata-rata ataupun masih kurangnya kesadaran dan kemampuan masyarakat.

Dalam hal kebijakan pembangunan rumah susun BidaraCina ini, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah menyebabkan pemerintah menangani secara menyeluruh proses relokasi masyarakat dari pinggiran sungai Ciliwung ke rumah susun BidaraCina. Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya yang mengancam dan masalah kesehatan menjadi alasan mengapa masyarakat tidak ikut serta dalam proses kebijakan ini.

Namun seberapa pentingnya peran Negara, peran masyarakat dalam suatu kebijakan merupakan hal yang penting karena masyarakatlah yang akan terkena kebijakan tersebut. Dalam hal ini, masyarakat perlu diikutsertakan dalam proses relokasi tersebut. Hal ini dapat meminimalisasi penolakan terhadap rumah susun seperti yang dilakukan oleh beberapa masyarakat yang enggan untuk pindah ke sana karena beberapa hal. Karena biar bagaimanapun, rumah susun tersebut akan ditinggali oleh masyarakat itu sendiri.

Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam masalah ini diantaranya adalah:

1. Perlu adanya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga terjalin komunikasi yang baik. Hal ini untuk meminimalisasi kontra yang beredar di masyarakat.
2. Perlunya bantuan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang membantu masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah.
3. Perlunya sosialisasi kebijakan yang baik dari pemerintah kepada masyarakat yang menjadi objek kebijakan.

Dengan begitu model implementasi yang diterapkan oleh pemerintah dapat berubah dari *State Interest-Elitis* menjadi *Society Perspectives-Pluralis* dimana masyarakat dapat ambil bagian dari implementasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

